

PENENTUAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN PELAYANAN DISETIAP KECAMATAN DI KOTA SUNGAI PENUH

Iin Sentia¹

Universitas Bung Hatta
Iinsentia250101@gmail.com

Wenny Widya Wahyudi²

Universitas Bung Hatta
Wennyww4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan penyediaan fasilitas pelayanan antar kecamatan di Kota Sungai Penuh yang berdampak pada perbedaan tingkat perkembangan wilayah. Konsentrasi fasilitas di pusat kota menyebabkan wilayah pinggiran tertinggal dalam akses pelayanan publik, sehingga menimbulkan kesenjangan spasial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan pelayanan dan mengklasifikasikan peran kecamatan dalam sistem pelayanan kota. Metode yang digunakan adalah kombinasi analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik skalogram untuk menentukan hirarki pusat pelayanan, serta tipologi Klassen untuk mengelompokkan kecamatan berdasarkan potensi pengembangan. Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian dengan RTRW 2024–2044 pada penetapan Kecamatan Sungai Penuh sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan konsistensi Kecamatan Koto Baru yang belum berperan sebagai pusat pelayanan. Namun, terdapat perbedaan pada penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) di empat kecamatan yang secara eksisting masih tergolong berkembang potensial, serta dua kecamatan maju (Pondok Tinggi dan Sungai Bungkal) yang belum dimasukkan dalam sistem pusat pelayanan RTRW. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pusat pelayanan utama dan peningkatan fasilitas di wilayah berkembang potensial diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan antar kecamatan. Temuan ini dapat menjadi masukan strategis dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pusat pertumbuhan, pelayanan publik, skalogram, tipologi klassen

ABSTRACT

This research is motivated by the inequality in the provision of service facilities between sub-districts in Sungai Penuh City which has an impact on differences in regional development levels. The concentration of facilities in the city center causes the outskirts to be left behind in access to public services, thus creating spatial disparities. This study aims to identify service growth centers and classify the role of sub-districts in the city service system. The method used is a combination of qualitative and quantitative descriptive analysis, with scalogram techniques to determine the hierarchy of service centers, and Klassen typology to group sub-districts based on development potential. The results of the analysis indicate that there is a

conformity with the 2024–2044 RTRW in the determination of Sungai Penuh District as a City Service Center (PPK) and the consistency of Koto Baru District which has not yet played a role as a service center. However, there are differences in the determination of City Service Sub-Centers (SPK) in four existing sub-districts that are still classified as potentially developing, as well as two developed sub-districts (Pondok Tinggi and Sungai Bungkal) that have not been included in the RTRW service center system. This study concludes that strengthening main service centers and improving facilities in potentially developing areas is necessary to encourage equitable development between sub-districts. These findings can be strategic input in spatial planning and sustainable development of Sungai Penuh City..

Keyword: Growth center, public service, scalogram, Klassen typology

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman yang berhubungan secara fungsional melalui jaringan prasarana dan sarana. Dalam konsep *central place* yang dikemukakan oleh Christaller, pusat pelayanan memiliki peran strategis dalam melayani kebutuhan wilayah sekitarnya dengan memperhatikan jangkauan (*range*) dan ambang batas (*threshold*) penduduk (Maulina et al., 2018). Pusat pertumbuhan wilayah juga dipahami sebagai kutub ekonomi yang mampu memberikan efek sebar (*spread effect*) maupun efek balik (*backwash effect*), sehingga keberadaannya sangat menentukan arah dan pola pengembangan wilayah (Tarigan, 2004; Muta'ali, 2015).

Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom di Provinsi Jambi memiliki posisi geografis yang strategis sebagai simpul pelayanan regional. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antar kecamatan dalam ketersediaan fasilitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan infrastruktur dasar. Fasilitas lebih terkonsentrasi di pusat kota, sedangkan wilayah pinggiran relatif tertinggal. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan serta lemahnya keterkaitan antarwilayah. Sementara itu, dalam RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024–2044 telah diarahkan penguatan sistem pusat pelayanan dan pemerataan pembangunan, namun belum ada kajian komprehensif yang mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan pelayanan berdasarkan kondisi eksisting.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi pusat-pusat pertumbuhan, menganalisis tingkat hierarki pusat pelayanan, serta mengklasifikasikan kecamatan di Kota Sungai Penuh ke dalam tipologi pengembangan wilayah untuk mengetahui wilayah prioritas pengembangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dengan memperkaya kajian perencanaan wilayah, secara praktis sebagai dasar rekomendasi bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penataan ruang dan pemerataan fasilitas pelayanan, serta secara strategis mendukung terwujudnya pembangunan perkotaan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting penyediaan dan persebaran fasilitas pelayanan di setiap kecamatan berdasarkan data sekunder dari instansi terkait, dokumen resmi, dan data spasial. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa angka dengan dukungan metode statistik, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan terukur (Sugiyono, 2018).

Kerangka teoritis penelitian mengacu pada Teori Wilayah Pusat (Muta'ali, 2015) yang menekankan pemetaan wilayah berdasarkan fungsi pelayanan, distribusi fasilitas, serta jangkauan layanan. Teori ini dilengkapi dengan Teori Tempat Sentral (Central Place Theory) dari Christaller (1933), yang menjelaskan struktur hierarkis pusat pelayanan berdasarkan

distribusi fasilitas dan keterkaitannya dengan wilayah hinterland. Kedua teori tersebut dipadukan untuk menganalisis peran setiap kecamatan dalam sistem pelayanan Kota Sungai Penuh.

Metode analisis yang digunakan meliputi tiga tahap utama. Pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi penyediaan fasilitas pelayanan di setiap kecamatan tanpa melakukan generalisasi. Kedua, analisis skalogram untuk mengidentifikasi distribusi fasilitas pelayanan dan menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan kelengkapan fasilitas yang dimiliki (Muta'ali, 2015). Ketiga, analisis tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan kecamatan ke dalam empat kuadran perkembangan wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi pelayanan, sebagai adaptasi dari metode Klassen berbasis ekonomi (Bourne, 2001).

Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan dokumen RTRW Kota Sungai Penuh 2024–2044. Tahap ini bertujuan menilai kesesuaian hasil analisis dengan arahan penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK), dan Pusat Lingkungan (PL) dalam RTRW. Analisis perbandingan ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi pengembangan wilayah serta peningkatan pusat-pusat pertumbuhan pelayanan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebijakan tata ruang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis pada penelitian ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu analisis skalogram untuk menentukan hirarki pusat pelayanan dan analisis tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan prioritas pengembangan wilayah.

1. Analisi Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fasilitas pelayanan dan menentukan hirarki pusat pelayanan di Kota Sungai Penuh. Fasilitas pelayanan dinilai dengan skoring menggunakan ukuran nominal, yaitu nilai (1) apabila fasilitas tersedia dan (0) apabila tidak tersedia. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah fasilitas, pengujian validitas melalui Coefficient of Reproducibility (COR), serta pengelompokan orde berdasarkan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Sungai Penuh memiliki jumlah fasilitas pelayanan terbanyak, yaitu 29 unit, sehingga menempati posisi tertinggi dalam sistem pelayanan kota. Sebaliknya, Kecamatan Hamparan Rawang dan Koto Baru memiliki jumlah fasilitas paling sedikit, yaitu 14 unit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi fasilitas pelayanan antar kecamatan.

Hasil uji keabsahan menggunakan rumus COR menghasilkan nilai 0,9, yang berarti data valid dan layak digunakan untuk menentukan hirarki pusat pelayanan. Dengan jumlah kecamatan sebanyak delapan wilayah ($n=8$), diperoleh jumlah orde sebesar 4. Rentang interval yang dihitung adalah sebesar 3,75, sehingga pengelompokan orde dapat dilakukan dengan membagi kecamatan berdasarkan jumlah fasilitas yang dimiliki.

Tabel 1

Hirarki Kecamatan Berdasarkan Analisis Skalogram

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas	Orde
1	Sungai Penuh	29	1
2	Sungai Bungkal	23	2
3	Pondok Tinggi	20	3
4	Pesisir Bukit	17	4
5	Kumun Debai	16	4
6	Tanah Kampung	16	4
7	Hamparan Rawang	14	4
8	Koto baru	14	4
Jumlah Fasilitas		149	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Pembagian orde ini menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh memiliki pola konsentrasi pelayanan yang kuat di pusat kota, dengan Kecamatan Sungai Penuh sebagai pusat utama. Kecamatan Sungai Bungkal dan Pondok Tinggi berfungsi sebagai pusat pelayanan sekunder, sedangkan lima kecamatan lainnya masih memiliki peran terbatas dalam penyediaan fasilitas.

Temuan ini sejalan dengan teori wilayah pusat (Muta'ali, 2015) yang menekankan bahwa pusat dengan kelengkapan fasilitas tertinggi berfungsi sebagai magnet pertumbuhan, sedangkan wilayah dengan fasilitas terbatas cenderung bergantung pada pusat utama. Dengan demikian, strategi pengembangan wilayah di Kota Sungai Penuh perlu diarahkan pada pemerataan fasilitas pelayanan di kecamatan orde III dan orde IV agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pusat kota dan mendukung keseimbangan pertumbuhan antar wilayah

2. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan kecamatan di Kota Sungai Penuh berdasarkan dua indikator utama, yaitu jumlah fasilitas pelayanan dan jumlah penduduk. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah dan peran masing-masing kecamatan dalam sistem pelayanan regional. Hasil dari analisis tipologi kelas ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Analisa lokasi

Kuadran I : Wilayah maju dan Berkembang Cepat	Kuadran II : Wilayah Maju Namun Berkembang Lambat
Sungai Penuh Sungai Bungkal Pondok Tinggi	-
Pesisir Bukit Tanah Kampung Kumun Debai Hampanan Rawang Koto Baru	-
Kuadran III : Wilayah Berkembang Potensial	Kuadran IV : Wilayah Tertinggal

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan hasil analisis, Kota Sungai Penuh terbagi ke dalam tiga kelompok wilayah sebagai berikut:

1. Kuadran I (Wilayah Maju dan Berkembang Cepat)
Kecamatan Sungai Penuh, Sungai Bungkal, dan Pondok Tinggi masuk dalam kategori ini. Ketiganya memiliki jumlah fasilitas pelayanan di atas rata-rata dan jumlah penduduk yang tinggi sehingga berperan sebagai pusat pertumbuhan utama kota.
2. Kuadran II (Wilayah Maju namun Berkembang Lambat)
Pada kategori ini tidak terdapat kecamatan. Artinya, tidak ada wilayah yang memiliki fasilitas tinggi tetapi dengan pertumbuhan penduduk rendah.

3. Kuadran III (Wilayah Berkembang Potensial)
Lima kecamatan termasuk dalam kategori ini, yaitu Pesisir Bukit, Tanah Kampung, Kumun Debai, Hamparan Rawang, dan Koto Baru. Meskipun jumlah fasilitas pelayanan relatif rendah, namun jumlah penduduk cukup besar. Kondisi ini menunjukkan potensi berkembang apabila didukung dengan peningkatan ketersediaan fasilitas.
4. Kuadran IV (Wilayah Tertinggal)
Tidak ada kecamatan yang masuk dalam kategori ini. Artinya, seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh memiliki minimal salah satu faktor (penduduk atau fasilitas) yang relatif tinggi.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan pelayanan di Kota Sungai Penuh masih terkonsentrasi di tiga kecamatan inti, sementara lima kecamatan lainnya berperan sebagai wilayah potensial yang membutuhkan perhatian dalam perencanaan penyediaan fasilitas di masa mendatang

3. Keseuaian Hasil Tipologi Klassen Dengan Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kota Sungai Penuh terbagi dalam dua kuadran utama. Kuadran I (maju dan berkembang cepat) meliputi Kecamatan Sungai Penuh, Sungai Bungkal, dan Pondok Tinggi, sedangkan Kuadran III (berkembang potensial) terdiri dari Kecamatan Pesisir Bukit, Tanah Kampung, Kumun Debai, Hamparan Rawang, dan Koto Baru.

Sementara itu, menurut Perda Nomor 02 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Sungai Penuh 2024–2044, sistem pusat pelayanan ditetapkan sebagai berikut: (1) Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kecamatan Sungai Penuh, (2) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) di Tanah Kampung, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, dan Kumun Debai, serta (3) Pusat Lingkungan (PL) di lima lokasi kelurahan. Perbandingan hasil analisis Tipologi Klassen dengan penetapan pusat pelayanan dalam RTRW dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Perbandingan Tipologi Klassen dengan Rencana Sistem Pusat Pelayanan

No	Kecamatan	Kuadran Tipologi Klassen	Peran dalam RTRW Kota Sungai Penuh	Keterangan
1	Sungai Penuh	Kuadran I	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sesuai, sebagai pusat utama sekaligus wilayah maju.
2	Pondok Tinggi	Kuadran I	Tidak ditetapkan	Berbeda, wilayah maju tetapi belum ditetapkan dalam RTRW
3	Sungai Bungkal	Kuadran I	Tidak ditetapkan	Berbeda, wilayah maju berpotensi sebagai sub pusat
4	Kumun Debai	Kuadran III	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Belum konsisten, ditetapkan sebagai SPK namun kondisi eksisting masih tertinggal
5	Pesisir Bukit	Kuadran III	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Sama, arah RTRW ke depan namun belum sesuai kondisi aktual
6	Tanah Kampung	Kuadran III	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Sama, ditetapkan sub pusat meskipun masih lemah secara eksisting
7	Hamparan Rawang	Kuadran III	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Sama, potensial dikembangkan meskipun masih tertinggal
8	Koto Baru	Kuadran III	Tidak di tetapkan	Relatif konsisten, bukan pusat pelayanan dan memang masih tertinggal
9	PL Debai, PL Dujung Sakti, PL Renah Kayu Embun, PL Talang Lindung, PL Koto Padang	Tidak dianalisis (hanya kecamatan di Klassen)	Pusat Lingkungan (PL)	Tidak dapat dibandingkan langsung

Sumber: Hasil Analisa, 2025 dan RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penetapan Kecamatan Sungai Penuh sebagai PPK konsisten dengan analisis Tipologi Klassen. Namun, empat kecamatan yang ditetapkan sebagai SPK dalam RTRW masih berada pada Kuadran III, sehingga terjadi perbedaan antara kondisi eksisting dengan arah pengembangan. Sebaliknya, Kecamatan Pondok Tinggi dan Sungai Bungkal masuk Kuadran I (maju), tetapi belum ditetapkan dalam RTRW sebagai pusat pelayanan.

Hal ini menunjukkan bahwa Tipologi Klassen lebih merepresentasikan kondisi aktual, sedangkan RTRW menggambarkan arah kebijakan jangka panjang. Perbedaan tersebut menegaskan strategi pemerintah daerah yang berfokus pada pemerataan pembangunan dengan mendorong wilayah yang tertinggal agar berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai penentuan pusat-pusat pertumbuhan pelayanan di Kota Sungai Penuh menghasilkan beberapa temuan utama. Pertama, analisis skalogram menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pelayanan masih belum merata. Kecamatan Sungai Penuh menempati orde I sebagai pusat pelayanan utama, diikuti Sungai Bungkal (orde II) dan Pondok Tinggi (orde III), sementara lima kecamatan lainnya berada pada orde IV dengan peran pelayanan terbatas.

Kedua, analisis Tipologi Klassen membagi wilayah Kota Sungai Penuh ke dalam dua kategori utama, yaitu Kuadran I (maju dan berkembang cepat) yang terdiri dari Kecamatan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal, serta Kuadran III (berkembang potensial) yang meliputi Kecamatan Kumun Debai, Pesisir Bukit, Tanah Kampung, Hamparan Rawang, dan Koto Baru. Tidak terdapat kecamatan yang masuk Kuadran II maupun Kuadran IV.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dan perbedaan dengan RTRW Kota Sungai Penuh 2024–2044. Penetapan Kecamatan Sungai Penuh sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) sejalan dengan hasil analisis, sedangkan empat kecamatan pinggiran yang masih tergolong berkembang potensial (Kuadran III) telah ditetapkan dalam RTRW sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK). Hal ini mencerminkan kebijakan pemerintah daerah yang visioner, dengan tujuan mendorong pemerataan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Secara keseluruhan, analisis skalogram dan Tipologi Klassen merepresentasikan kondisi eksisting pelayanan, sementara RTRW memberikan arah kebijakan jangka panjang dalam pengembangan sistem pusat pelayanan di Kota Sungai Penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, E., & Rudiarto, I. (2020). Analisis hierarki pusat pelayanan berdasarkan teori tempat sentral Christaller di Kabupaten Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 16(2), 154–166.
- Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. (2025). Kota Sungai Penuh dalam angka 2025. Sungai Penuh: BPS.
- Bintarto. (1977). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa dan Kota*. Ghalia Indonesia.
- Bourne, L. S. (2001). *Urban systems: Strategies for regulation and planning*. Oxford University Press.
- Christaller, W. (1933). *Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*. Gustav Fischer, Jena.

- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *Perencanaan sosial di dunia ketiga*. Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-4)*. Balai Pustaka.
- Ermawati. (2010). *Analisis penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (Skripsi, Universitas Sebelas Maret)*.
- Fadli, R. (2017). *Perencanaan wilayah dan kota: Pendekatan konsep dan teori*. Prenadamedia Group.
- Farizal, F., Hidayanti, A., & Kuncoro, T. (2011). Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pusat pertumbuhan (Studi kasus: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 3(1), 1–12.
- Filipus, F., & Tondobala, R. (2019). Faktor penentu pusat pelayanan kota di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Ilmu Geografi*, 11(1), 1–12.
- Geovani, M. R., & Poluan, M. F. (2007). Pusat kota dan sub pusat pelayanan di Kota Manado. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 55–63.
- Gulo, E. (2015). Analisis hierarki pusat pelayanan berdasarkan teori tempat sentral di Kabupaten Dairi. In *Jurnal Planesa* (Vol. 3, Issue 1).
- Hardati. (2016). *Geografi Perdesaan dan Perkotaan*. UNY Press.
- Hartono. (2007). *Teori lokasi dan pengembangan wilayah*. UGM Press.
- Januarman, A., Ahyuni, S., & Purwaningsih, D. (2018). Konsep teori pusat pertumbuhan dan aplikasinya pada pengembangan wilayah. *Jurnal Teknik PWK*, 7(1), 15–26.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2004). *SNI 03-1733-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional
- Klassen, L. H. (1963). *Quantitative methods in regional economic planning*. OECD.
- Maulina, F., Rudiarto, I., & Faqih, M. (2018). Kajian central place theory dalam sistem pelayanan sosial ekonomi. *Jurnal Teknik PWK Undip*, 7(4), 145–156.
- Mirsa, M. (2012). *Perkembangan kota dan permasalahannya*. Rajagrafindo Persada.
- Muta'ali, L. (2009). *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Pendekatan Analisis Indeks*. Pustaka Pelajar.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik analisis regional untuk perencanaan wilayah, tata ruang dan lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Nugroho, S. P. et al. (2004). *Pembangunan dan permasalahan wilayah*. LPFE UI.
- Pratama, B. (2018). *Analisis hierarki wilayah dan interaksi wilayah untuk penentuan pusat pelayanan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Riduwan. (2005). *No Title: Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta.
- Riyadi, B. (2007). *Perencanaan wilayah dan kota di Indonesia*. ITB Press.
- Robinson, D. (2005). *Urbanization and development: Urban prospects in the 21st century*. Routledge.
- Rondinelli, D. A. (1985). *Applied methods of regional analysis: The spatial dimensions of development policy*. Westview Press.
- Rustiadi, E. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi*. Rajawali Pers.
- Soepono, B. (2000). *Teori ekonomi regional*. Bina Aksara.

- Soetomo, S. (2006). *Urbanisasi dan morfologi perkotaan*. ITS Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. (1987).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Utari, P. (2015). Penentuan hirarki wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan. *Jurnal Teknik PWK*, 5(2), 45–53.
- Utoyo, B. (2007). *No Title: Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia*.
- Wahyudi, I. (2013). *Analisis skalogram dalam perencanaan wilayah*. Gadjah Mada University Press.
- Wangsa et al. (2020). Studi persebaran fasilitas pemerintahan, sosial, dan ekonomi. *Jurnal Planologi*, 17(3), 101–110.
- Yuniningsih, T. (2020). Integrasi skalogram dan indeks sentralitas dalam tipologi Klassen untuk perencanaan pendidikan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Wilayah Dan Kota*